



TERBAIK: Gubernur D.I. Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta (4/7).

REFORMASI BIROKRASI DI YOGYAKARTA TAHUN 1945

Utamakan Demokratisasi

"Bahwa perhoeboengan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Poesat Negara Republik Indonesia, bersifat langsoeng dan kami bertangoeng jawab atas negeri kami langsoeng kepada Presiden Repoeblik Indonesia. Kami memerintahkan soepaja segenap pendoeoek dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini."

DAERAH Istimewa Yogyakarta memiliki peran sangat besar dalam birokrasi pemerintahan di Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengku Buwono IX andil merancang konsep birokrasi yang diterapkan di negeri ini.

Sultan HB IX memiliki pemikiran hebat dalam merancang dan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis. Saat pemerintah pendudukan Jepang sebelum tahun 1945, Sultan HB IX didaulat menjadi kepala pemerintahan di Yogyakarta dengan sebutan Koo. Beliau segera merancang bentuk pemerintahan yang melibatkan peran rakyat dalam pengambilan keputusan.

Sultan HB IX memadukan antara sistem pemerintahan tradisional yang otoriter dengan sistem demokrasi yang saat itu berkembang di negara-negara maju. Ide tersebut terwujud saat awal Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yakni 18 Agustus 1945, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII segera mengirim surat yang ditujukan kepada Ir Soekarno dan Mohammad Hatta. Isi surat tersebut menegaskan mendukung proklamasi kemerdekaan tersebut.

Soekarno segera membalas surat itu. Pada 19 Agustus 1945, Soekarno mengeluarkan Piagam Kedudukan yang menegaskan Sultan HB IX dan Sri Paduka Pakualam VIII menjadi penguasa di Yogyakarta. Bersama Sri Paduka Pakualam VIII, Sultan HB IX kemudian mengeluarkan maklumat mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 5 September 1945. Pernyataan itu sekaligus menjelaskan kedudukan Sultan HB IX sebagai raja di Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Selain itu, mendeklarasikan wilayah Kraton Yogyakarta berstatus daerah istimewa yang berada di dalam NKRI. "Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat keradjaan adalah daerah istimewa Negara Republik Indonesia."

Sultan HB IX menjadi pemegang kekuasaan di Yogyakarta. Dalam melaksanakan kewajibannya, Sultan HB IX menegaskan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. "Bahwa perhoeboengan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Poesat Negara Republik Indonesia, bersifat langsoeng dan kami bertangoeng jawab atas negeri kami langsoeng kepada Presiden Repoeblik Indonesia."

Kami memerintahkan soepaja segenap pendoeoek dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini."

Sultan HB IX mengambil langkah-langkah strategis. Sultan HB IX dan Paku Alam VIII merangkul semua kelompok masyarakat untuk kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) DIY. KNID dinyatakan merupakan bagian sistem dari pemerintahan DIY.

Langkah-langkah demokratisasi terus dilakukan. Demokratisasi dilaksanakan hingga tingkat paling bawah yakni desa.

Sultan HB IX memfungsikan KNID DIY sebagai badan perwakilan dalam sistem pemerintahan di Yogyakarta terhitung mulai 30 Oktober 1945. Sejak saat itu, setiap keputusan KNID tak hanya ditandatangani oleh ketuanya. Keputusan juga selalu ditandatangani Sultan HB IX dan Pakualam VIII. Penempatan KNID sebagai badan legislatif di dalam pemerintahan menunjukkan adanya keinginan Sultan HB IX untuk melakukan demokratisasi di dalam sistem pemerintahan Yogyakarta.

Sebagai kepala daerah, Sultan HB IX tidak memerintah secara monarkhi absolut. Tapi, monarkhi representatif. Sultan HB IX adalah eksekutif yang menjalankan keputusan KNID, yang merupakan wujud kehendak rakyat.

Bahkan, Sultan HB IX menghendaki sistem perwakilan dikembangkan dan tidak hanya diterapkan pada level pemerintahan DIY. Diterapkan di tingkat kabupaten hingga desa.

KNID tingkat kabupaten diakui sebagai badan legislatif. Pada 6 Desember 1945, diberlakukan aturan membentuk badan perwakilan di tiap-tiap desa yang disebut sebagai Dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan mewakili seluruh rakyat di wilayah perwakilan untuk membicarakan program desa dan membuat peraturan tingkat desa.

Anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh warga desa setempat. Syaratnya berusia lebih 18 tahun dan sudah enam bulan menjadi warga di desa tersebut. Masa bakti Dewan Kelurahan selama tiga tahun.

Konsep pemerintahan yang diterapkan Sultan HB IX tersebut sangat demokratis. Konsep yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut lebih maju dibanding daerah lain di Indonesia. (*)

Pelayan Masyarakat, Jawab Tuntutan Zaman

REFORMASI birokrasi mendapat perhatian tinggi dari Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Birokrasi harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Saat menjadi pembicara utama dalam *International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019* di Bali, Sultan HB X menegaskan pentingnya terus berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi.

Menurutnya, perjalanan reformasi birokrasi di Pemrov DIY dilaksanakan sejak 2003. Reformasi birokrasi terus dijalankan hingga sekarang.

Komitmen Pemda DIY mengawal reformasi birokrasi tersebut berbuah manis. Pemda DIY adalah satu-satunya instansi pemerintah yang meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi. Oleh karenanya, pelaksanaan reformasi tidak mungkin berhenti dan harus terus dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman," tegasnya.

Dalam reformasi birokrasi, Pemda DIY melakukan perbaikan di berbagai bidang sesuai dengan perubahan paradigma admi-

nistrasi publik menjadi *result oriented government*. Ada enam poin utama perubahan yang dijalankan di Pemda DIY.

Keenam poin tersebut adalah memperbaiki sistem perencanaan dan akuntabilitas, merestrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah, memperbaiki manajemen sumber daya manusia, melakukan reorientasi pengelolaan keuangan daerah, melakukan perbaikan sistem pengawasan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam sebuah kesempatan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pertengahan Juli lalu, Sultan HB X menyatakan reformasi birokrasi harus terus bergulir. Menurutnya, birokrasi bukan sekadar rutinitas.

Birokrasi perlu ditingkatkan terus menerus. Terutama menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pelayanan harus selaras dengan perkembangan masyarakat.

"Birokrasi itu jangan merasa kuasa. Tapi, pelayan masyarakat," jelasnya. (*)



SULTAN HAMENGGU BUWONO X

Budaya Pemerintahan SATRIYA

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai budaya pemerintahan SATRIYA. Budaya pemerintahan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Budaya pemerintahan Satriya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi. Transformasi birokrasi yang dilaksanakan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal DIY yakni filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh*, serta semangat *golong gilig*.

Hamemayu hayuning bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia. Selain itu, lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh perikehidupan baik dalam skala kecil (keluarga) atau masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak dan tidak mementingkan diri sendiri.

Turunan dari filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam konteks aparatur dapat dijabarkan menjadi tiga aspek. Pertama, *rahayuning bawana kapurba waskithaning manungsa*. Artinya, kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia.

Kedua, *darmaning satriya mahanani rahayuning nagara*. Maknanya, pengab-

dian ksatria menyebabkan kesejahteraan dan ketenteraman negara.

Ketiga, *rahayuning manungsa duma-di karena kamanungsane*. Artinya, kesejahteraan dan ketenteraman manusia terjadi karena kemanusiaannya.

Budaya pemerintahan SATRIYA merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*. SATRIYA memiliki dua makna. Pertama, SATRIYA dimaknai sebagai watak ksatria. Watak ksatria adalah sikap memegang teguh ajaran moral: *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab). Semangat dimaksud adalah *golong gilig* yang artinya semangat persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Sifat atau watak inilah yang harus menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan makna kedua, SATRIYA merupakan "singkatan" dari Selaras, Akal budi luhur, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, serta Ahli-profesional. Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang memiliki makna dan pengertian luhur.

Budaya pemerintahan SATRIYA ditunjukkan dalam bentuk atau logo khusus. Logo SATRIYA berbentuk bulat dengan warna dasar kuning. Di dalamnya terdapat tulisan huruf Jawa S besar (*sa murda*) pada sebelah kiri-bawah berwarna hijau tua. Ukuran tinggi huruf seper-

tiga dari diameter lingkaran dan lebar huruf dua pertiga diameter lingkaran.

Pada bagian bawah huruf S bertuliskan SATRIYA berwarna merah. Di bagian tepi-atas sampai tepi-bawah melingkar ke arah kanan bertuliskan Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya Diri, Ahli Profesional berwarna merah pada huruf S, A, T, R, I, Y, dan A di awal kata dan warna hitam pada huruf lainnya dengan ukuran panjang dua pertiga keliling lingkaran.

Logo budaya pemerintahan SATRIYA memiliki lima arti. Pertama, bentuk bulat mempunyai arti persatuan semangat persatuan dan kesatuan. Kedua, huruf Jawa S besar (*sa murda*) merupakan kependekan kata dari kata SATRIYA dan terletak di sebelah kiri bawah yang mempunyai arti tidak menonjolkan diri, sebagai sikap seorang pamong yang selalu siap untuk melayani.

Ketiga, kata SATRIYA mempunyai arti watak ksatria yakni *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*. Yakni, watak yang perlu dimiliki oleh setiap aparatur. Keempat, rangkaian kata Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya Diri, Ahli Profesional merupakan kepanjangan dari singkatan SATRIYA, yang merupakan nilai-nilai pokok yang terkandung dalam filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*.

Keenam, warna kuning dan hijau sebagai warna pokok logo adalah warna *pare-anom* yang berarti lambang kesuburan untuk kesejahteraan rakyat dan merupakan warna khas Ngayogyakarta Hadiningrat. (*)



REFORMIS: Sultan Hamengku Buwono IX dan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta.